

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aziz Asmaeny, 2013, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Cahyadi Takariawan, 2002, *Fikih Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta, Debeta.
- Fuady munir 2009, *Konsep Negara Demokrasi*, Jakarta, Retika Aditama.
- Inu Kencana Syafie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Mandar Maju.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komariah Emong Separdjaja, 2008, *Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional departemene Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Liza Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono, *Pengakuan Peranan Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia*, Jakarta, LBH APIK.
- Luhut M. P. Pangaribuan, 1989, *hak Rakyat atas pembangunan*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Liberty.
- Mirian Budiarmo, 1995, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiarmo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Roth dan Wilson, 1980, *The comparative Study of Politic*, New York, Prencite Hall Inc.
- Rush dan Althoff, 2004, *Pengantar Sosial Politik*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY.
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

ARTIKEL DAN JURNAL

- Amelia Idris, 2016, Partisipasi Politik Perempuan di Partai Demokrat Pada Pemilihan Anggota Legislatif 2014 Kabupaten Perigi Moutong, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 3.
- Asmawai, 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Benny Bambang Irawan, 2007, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.
- Dessy Artina, 2016, Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 1.
- Hastuti Purnaweni, 2004, Demokrasi Indonesia : Dari Masa Ke Masa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.2.
- Loura Hardjaloka, 2012, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2.
- Mashuri, 2013, Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Riau, *Menara*, Vol. 12, No. 2.
- Nalom Kurniawan, 2014, Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, *Jurnal Konstitusi*, Vol.
- Rabina Yunus, 2014, Model Peningkatan Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Publik, Kendari, UMK Press, *Jurnal Government*, Vol. II, No. 2.
- Zaenal Mukarom, 2008, Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif, *Jurnal Mediator*, Vol. 9, No. 2.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013.